PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

TRIADI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
triadi@stihpadang.ac.id

Abstract: *Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as follows: attached in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Drug abuse (narcotics and dangerous drugs) is an international crime and an extra ordinary crime (extraordinary crime). This extraordinary crime is a crime that has a systematic impact on people's lives. The process of investigating the problem of narcotics crime is a method of investigation or a system used to find and collect evidence in order to find the suspect and determine related criminal acts that occurred in accordance with the Criminal Procedure Code. After the investigative action, the criminal justice system switches to investigative action in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal politics of investigation in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be seen from the scope of criminal law which includes three provisions, namely criminal acts, liability, and sentencing. In the process of drafting this Narcotics Law, there is a legal policy policy from legislation which mandates four categorizations of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions.*

Keywords: *Investigation, Crime, Narcotics.*

Abstrak: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime (kejahatan Luar biasa). Kejahatan luar biasa ini merupakan kejahatan yang berdampak sistematis di kehidupan masyarakat. Proses penyidikan masalah tindak pidana narkotika merupakan cara penyidikan atau sistem yang digunakan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya dan menentukan terkait tindak pidana yang terjadisesuai KUHAP. Setelah tindakan penyidikan, sistem peradilan pidana beralih ke tindakan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Politik hukum penyidikan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotikabisa terlihat dari ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Dalam proses penyusunan Undang-undnag Narkotika ini, ada kebikakan politik hukum dari legislasi yang mengamanatkan pada empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika.

A. Pendahuluan

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda (Suswantoro, 2018).

Bagi undang-undang narkotika, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih,

telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) (Kantaatmadja, 2002) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Substansi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Yang bersifat pribadi di bedakan menjadi dua sifat, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan gejala yang tidak baik.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan dengan syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf..

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial (Abdul Azis, 2022), budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan terhadap narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkoba itu sendiri (Muhammad Mustafa, 2007).

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba di Indonesia, pemerintah berperan selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni (Siswanto Sunarso, 2005): (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum

dengan sarana non penalmempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu mencari logisnya aturan-aturan hukum, dimana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law ini books*. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan tentang Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni berdasarkan pertimbangan penyidik berdasar cara yang diberi wewenang dalam peraturan perundang-undangan ini guna menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi serta menemukan tersangka. Sedangkan Menurut Harahap, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tindakan penyidikan ditekankan pada tindakan “mengumpulkan serta mencari barang bukti agar tindak pidana yang didapatkan bisa menjadi barang bukti, dan agar bisa ditemukan dan ditetapkan pelakunya. Dalam hal ini, tindakan penyidik pada lingkup langsung di lapangan (TKP) penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi dan juga bukti yang diperoleh di Tempat kejadian perkara (TKP), mengenai apa-apa saja yang berkaitan tindak pidana tersebut. Akibatnya, karena tersangka telah melanggar hukum, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghadapi hukuman sebagai akibat perbuatannya (Moh. Taufik Makaro, 2005).

Kemudian yang berwenang dalam melaksanakan proses penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik ialah aparat kepolisian negara atau beberapa pegawai negeri sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara khusus diberikewenangan oleh undang-undang untuk penyidikan. Suatu proses penyidikan secara prosedural dianggap telah dimulai apabila pejabat yang berwenang di lembaga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, setelah polisi menerima pengaduan atau data yang menunjukkan adanya tindak pidana, atau mengidentifikasi sendiri bahwa kejadian yang diperkirakan adalah tindak pidana. bertindak. Keistimewaan ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang polisi, dan bila digabungkan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru, hal itu memberikan jaminan bagi hak-hak tersangka untuk dilindungi.

Proses penyidikan masalah tindak pidana narkotika merupakan cara penyidikan atau sistem yang digunakan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya dan menentukan terkait tindak pidana yang terjadisesuai KUHAP. Setelah tindakan penyidikan, sistem peradilan pidana beralih ke tindakan penyidikan (Lilik Mulyadi, 2008). Tahap penyidikan awal dimulai penyidikan tahap pertama pada penyidikan yakni membantu rencana penyidikan. Rencana investigasi ini dibuat supaya arah investigasi, metode yang akan dipakai, orang yang akan dipakai, serta jangka waktu yang diperlukan untuk investigasi semua dapat ditentukan dari awal. Untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara, penyidik terlebih dahulu harus menyusun strategi penyidikan (Anton Sudanto, 2017).

Ada macam-macam kegunaan dari merencanakan penyidikan yakni: 1) Memberi penjabaran tentang penyidikan yang akan dilakukan jika tindakan yang penyidik lakukan tidak

dapat diterima, sehingga dapat dilakukan perubahan dengan menggunakan metode dan prosedur dalam penyidikan; 2) Termasuk proses kontrol yang atasan penyidik lakukan atas penyidikan yang akan penyidik lakukan; dan 3) Menghindari penyidik yang menjalankan wewenang selama pemeriksaan. Penyidikan bertujuan mengumpulkan atau menemukan data, bukti serta keterangan yang dipergunakan dalam Membuat titik terang terjadinya tindak pidana dan Siapa yang secara pidana bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Sedangkan sasaran penyidikan sendiri yakni bisa ditentukan bahwa sasaran penyidikan tindak pidana narkoba adalah: 1) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan; 2) Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan (secara pidana atas tindak pidana itu); dan 3) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana dalam melaksanakan tindakan penyidikan ialah tidak hanya dari pihak kepolisian saja melainkan juga ada lembaga lain yang berwenang yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN), hal ini sesuai Pasal 64 (1) undang-undang narkoba. Seperti yang tertuang di dalamnya, dalam badan inilah lalu diberi wewenang oleh pemerintah dengan Polri guna memberantas serta mengungkap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tidak ada sebelumnya di dalam undang-undang lama. Hal yang perlu dilakukan antara Polisi dan BNN adalah berkoordinasi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama seperti halnya pihak Polisi menginformasikan kepada BNN apa yang polisi lakukan terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu.

Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sebaliknya, polisi bukanlah satu-satunya penyidik dalam kasus narkoba; mereka bekerjasama dengan Badan Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional mengontrol kewenangan penyidikan polisi dalam kasus narkoba. Lampiran ini diperlukan karena BNN harus diberitahu tentang apa yang telah dilakukan polisi terkait penyelidikan tersebut. BNN, di sisi lain, harus melapor ke polisi jika sedang melakukan penyelidikan. Secara teori, pendekatan ini mengatur koordinasi antara Polri serta BNN dan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan. Yang tidak diatur dalam undang-undang ini yaitu apa jadinya apabila polisi dan Badan Narkoba Nasional bersama-sama menetapkan tindak pidana narkoba dan melakukan penyidikan.

Persyaratan penyidikan tindak pidana narkoba yang diatur pada undang-undang pidana khusus telah berkembang seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia. Setelah berlakunya UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang berwenang dalam penyidikan serta penyidikan tindak pidana narkoba serta pembatasan perluasan taktik penyidikan tindak pidana narkoba, terjadi perubahan yang signifikan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan serta pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam hal teknik penyidikan ini terdapat teknik penyadapan. UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba. Pasal 75 huruf (i):dijabarkan “penyadapan” merupakan rangkaian penyidikan dan/atau penyidikan yang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN lakukan mempergunakan alat elektronik berdasar kemajuan teknologi dalam percakapan dan/atau pengiriman pesan lewat telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.⁶Hal mengenai penyadapan dalam UU ITE dilarang karena termasuk pelanggaran privasi. Akan tetapi, disini ada pengkhususan karena dalam pelaksanaan penyadapan ini dalam rangka penyidikan yang dilindungi hukum yang terkait.

Kemudian, pada Pasal 75 huruf (j) UU RI No 35 Tahun 2009 terkait Narkoba mengatur tentang kewenangan penyidik dalam menyelidiki, Pembelian terselubung dan pengiriman terkontrol adalah dua dari metode ini. Pasal 79 mengatur mengenai penggunaan teknik pembelian terselubung, berbunyi: Teknik penyidikan dan penyerahan pembelian secara terselubung di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf j dilaksanakan Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. UU No 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika mengizinkan penyidikan dengan cara pembelian terselubung, serta diatur dalam Pasal 55 huruf a, serta dalam Pasal 75 UU Narkoba

Penyidik Tindak Pidana Narkotika bertugas membeli terselubung ini, meskipun tidak semua penyidik diperbolehkan melakukannya. Terjadinya pembelian tersebut haruslah oleh penyidik yang sudah diberi surat perintah atau pekerjaan oleh pimpinan guna melakukan hal itu. UU Narkotika memberikan perlindungan kepada penyidik yang menggunakan cara pembelian secara sembunyi-sembunyi.

2. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, baik oleh Soedarto maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas (Barda Nawawi Arief, 2008), yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika yakni sebagai berikut:
  - 1) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128);
  - 2) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130);
  - 3) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131);
  - 4) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132);
  - 5) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133);
  - 6) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134);
  - 7) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135);

- 8) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137);
- 9) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138);
- 10) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139);
- 11) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140);
- 12) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141);
- 13) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142);
- 14) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143);
- 15) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144);
- 16) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147).

Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan dan juga penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi. kebijakan politik hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di indonesia dilihat dari jenis-jenis perbuatan yang di larang dalam Undang-undang Narkotika.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut ini: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika (Narkotika dan obat – obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan ekstra ordinary crime (kejahatan Luar biasa). Kejahatan luar biasa ini merupakan kejahatan yang berdampak sistematis di kehidupan masyarakat. Proses penyidikan masalah tindak pidana narkotika merupakan cara penyidikan atau sistem yang digunakan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya dan menentukan terkait tindak pidana yang terjadisesuai KUHP. Setelah tindakan penyidikan, sistem peradilan pidana beralih ke tindakan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Politik hukum penyidikan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotikabisa terlihat dari ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Dalam proses penyusunan Undang-undnag Narkotika ini, ada kebikakan politik hukum dari legislasi yang mengamanatkan pada empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis, *Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika*, Jurnal Bhakti Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips 11, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.
- Pande Ni Luh Putu Ayu, *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Diindonesia*, Ganesha Civic Education Journal, Volume 1, Issue 2, 2019.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Suswanto, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume.1 Nomor 1, 2018.